



PENTINGNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM PRAKTIK PELAYANAN PUBLIK MEMBANGUN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS

Akbarudin¹

¹PC NU Kota Serang

Abstrak

Tata kelola pemerintahan desa memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Tata kelola yang baik berkontribusi pada terwujudnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pembangunan desa. Artikel ini membahas pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas, dalam praktik pelayanan publik di tingkat desa. Studi ini menunjukkan bahwa dengan penerapan tata kelola yang berorientasi pada prinsip-prinsip tersebut, desa dapat lebih mudah mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Kesimpulannya, peran aktif pemerintah desa dan partisipasi masyarakat adalah faktor kunci untuk memastikan terciptanya tata kelola yang integratif dan akuntabel.

Kata kunci: *Tata Kelola, Pemerintahan Desa, Akuntabilitas*

Abstract

Village governance has a crucial role in improving the quality of public services at the local level. Good governance contributes to the realization of integrity and accountability in the implementation of services, which are indispensable to increase public trust and the effectiveness of village development. This article discusses the importance of applying good governance principles, such as transparency, participation, responsiveness, and accountability, in public service practices at the village level. This study shows that with the implementation of governance oriented towards these principles, villages can more easily achieve the goals of sustainable community development and welfare. In conclusion, the active role of village governments and community participation is a key factor in ensuring the creation of integrative and accountable governance.

Keywords: *Governance, Village Government, Accountability*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran sentral dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan. Sebagai unit pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan warga dan merespons isu-isu yang ada di lingkungannya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Tantangan ini sering kali disebabkan oleh lemahnya tata kelola pemerintahan desa, yang berdampak pada rendahnya tingkat integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan layanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, serta

orientasi pada hasil dan dampak sosial. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, pemerintah desa tidak hanya mampu menjalankan fungsinya dengan lebih efektif tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini sangat penting karena menjadi landasan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan adanya partisipasi aktif, setiap program dan kebijakan yang direncanakan pemerintah desa akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa memastikan bahwa pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang mereka buat, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya desa. Dalam konteks ini, akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong pemerintah desa agar terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya tata kelola pemerintahan desa dalam memperkuat praktik pelayanan publik yang berfokus pada integritas dan akuntabilitas. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana tata kelola yang baik dapat diterapkan di desa serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. (Bakhrur Rokhman , Denok Kurniasih, 2023). Menurut data dari berbagai survei dan lembaga antikorupsi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi sering kali rendah akibat banyaknya kasus korupsi dan ketidakprofesionalan yang melibatkan pegawai publik. Padahal, dalam konteks pelayanan publik, pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk melayani masyarakat secara adil, transparan, dan efisien. Etika, dalam hal ini, menjadi pedoman fundamental dalam menjalankan fungsi tersebut. Etika administrasi publik tidak hanya menjadi sekadar norma yang ideal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa para pelaksana birokrasi dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan akuntabilitas. Integritas merupakan kualitas moral yang sangat diperlukan dalam menjaga kepercayaan publik, di mana pegawai publik dituntut untuk tidak terlibat dalam perilaku yang dapat merusak reputasi pemerintahan. Sementara itu, akuntabilitas menekankan pentingnya pegawai publik untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan mereka, baik secara hukum maupun etika (Sulfiyah et al., 2023).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan, penerapan etika dalam administrasi publik menjadi semakin penting. Masyarakat

kini lebih kritis terhadap kinerja pemerintah, serta lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menegakkan prinsip-prinsip etika dalam seluruh lini administrasi publik, guna memastikan terciptanya tata kelola yang baik dan pelayanan yang optimal. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk menggali lebih dalam mengenai peran etika dalam administrasi publik, serta bagaimana penerapannya dapat berkontribusi dalam membangun integritas dan akuntabilitas yang kuat di dalam pemerintahan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya etika dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab (Betresia et al., 2021).

Administrasi publik memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di mana pegawai publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika. Etika dalam administrasi publik menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas dan akuntabilitas para pelaksana birokrasi. Integritas merujuk pada kejujuran dan konsistensi perilaku dengan nilai-nilai moral yang tinggi, sedangkan akuntabilitas adalah kemampuan pegawai publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil (Budiman et al., 2022).

Pentingnya etika dalam praktik administrasi publik semakin relevan dalam konteks modern, di mana masyarakat menuntut transparansi, keadilan, dan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah. Pelanggaran etika, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan, dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip etika dalam administrasi publik menjadi sebuah keharusan untuk memastikan bahwa para pegawai publik dapat bekerja secara profesional, adil, dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang mereka layani. Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, etika menjadi pemandu moral bagi para pegawai publik dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka. Etika juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol diri yang membantu para pejabat publik menghindari perilaku tidak etis yang dapat merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, penegakan etika dalam administrasi publik bukan hanya sekadar formalitas, melainkan langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ummah, 2019).

Membangun Integritas dan Akuntabilitas Etika dalam administrasi publik membantu menciptakan budaya integritas di kalangan pegawai pemerintah. Integritas merupakan elemen penting yang mencerminkan konsistensi moral dan etika dalam menjalankan tugas. Dengan integritas yang kuat, pegawai publik akan lebih mampu mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga dengan norma etika. Di sisi lain, akuntabilitas menuntut setiap pegawai untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga mereka tidak dapat bertindak sewenang-wenang (Tjahjanti, 2020). Menghindari Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi Etika berfungsi sebagai pagar moral yang menghalangi pegawai publik untuk terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik sering kali muncul karena lemahnya pemahaman dan penerapan etika. Dengan menegakkan etika yang kuat, risiko penyimpangan perilaku dan tindakan yang merugikan kepentingan umum dapat diminimalisir. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik yang beretika memastikan bahwa masyarakat diperlakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi atau nepotisme. Pegawai publik yang berpegang pada prinsip-prinsip etika akan lebih berorientasi pada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada transparansi, keadilan, dan profesionalisme (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Mempertahankan Kepercayaan Publik Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan pegawai publik. Ketika pegawai pemerintah bertindak dengan etika yang baik, masyarakat akan lebih percaya pada kemampuan dan niat baik pemerintah dalam mengelola kepentingan umum. Sebaliknya, pelanggaran etika dapat merusak reputasi pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, hilangnya kepercayaan publik dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, serta menghambat pembangunan (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan Dalam administrasi publik, pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Etika memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan secara terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting, terutama dalam hal alokasi sumber daya publik, pemberian izin, dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak luas. Menjaga Keharmonisan dalam Hubungan Antara Pemerintah dan

Masyarakat Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah berperilaku etis (Wahyuli, 2021). Etika administrasi publik memastikan bahwa setiap interaksi antara pemerintah dan warga negara didasarkan pada rasa hormat, kejujuran, dan keadilan. Ini penting untuk menciptakan suasana kerja sama yang produktif dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik. Secara keseluruhan, etika administrasi publik berfungsi sebagai fondasi yang menjaga kualitas pelayanan, memastikan tanggung jawab pegawai publik, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa etika, tata kelola pemerintahan yang baik sulit tercapai, dan risiko terjadinya penyimpangan semakin besar. Oleh karena itu, penerapan etika dalam administrasi publik bukan hanya menjadi kebutuhan, melainkan keharusan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif (Choirulsyah & Azhar, 2024).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman para informan terkait etika dalam administrasi publik. Dengan metode deskriptif, penelitian ini berfokus pada penggambaran fenomena etika administrasi publik, tanpa bermaksud mempengaruhi atau memanipulasi kondisi yang ada. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung dalam bidang administrasi publik, seperti pegawai pemerintah, akademisi, serta pakar dalam bidang etika publik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan pandangan mereka mengenai pentingnya etika dalam administrasi publik dan pengaruhnya terhadap integritas serta akuntabilitas. Data sekunder diambil dari berbagai literatur, jurnal akademik, buku, laporan pemerintah, dan regulasi terkait yang membahas tentang etika administrasi publik. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis yang dilakukan berdasarkan data primer. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti pengalaman dalam administrasi publik dan pemahaman tentang etika. Wawancara ini akan dilakukan secara semi-terstruktur, untuk memberikan ruang kepada informan dalam memberikan jawaban yang detail. Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi pemerintah yang dianggap relevan dengan isu etika administrasi publik. Subjek penelitian meliputi pegawai pemerintah yang bekerja di bidang administrasi publik,

pengambil kebijakan, serta akademisi yang memiliki fokus pada tata kelola pemerintahan dan etika publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya etika dalam administrasi publik, serta bagaimana penerapannya dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas di dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan studi dokumen, diperoleh beberapa temuan kunci yang mencerminkan peran strategis etika dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan Etika dalam Administrasi Publik Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika dalam administrasi publik di berbagai instansi pemerintahan masih bervariasi, tergantung pada kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan pengawasan yang diterapkan. Di beberapa instansi, etika telah menjadi bagian integral dari perilaku dan pengambilan keputusan, yang tercermin dalam kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Namun, di instansi lainnya, penerapan etika masih menghadapi kendala, terutama dalam bentuk minimnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika (Kurniawan, 2007).

Sebagai contoh, salah satu narasumber dari sebuah instansi pemerintah daerah mengungkapkan bahwa pelatihan etika rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Hal ini menciptakan budaya organisasi yang mendorong transparansi dan tanggung jawab individu dalam menjalankan tugas. Namun, di beberapa kasus, kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi di lapangan masih terjadi, di mana perilaku tidak etis kadang dibiarkan karena lemahnya mekanisme pengawasan.

Etika sebagai Penggerak Integritas Integritas merupakan salah satu aspek yang paling dipengaruhi oleh penerapan etika. Dari data yang diperoleh, ditemukan bahwa pegawai publik yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip etika cenderung menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai moral yang diharapkan. Mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, menghindari konflik kepentingan, dan lebih bertanggung jawab atas hasil kerja mereka (Dini Ayu Permata Sari et al., 2024).

Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa integritas pegawai tidak hanya dibangun melalui pengawasan eksternal, tetapi juga melalui budaya internal yang menekankan pentingnya kejujuran dan komitmen pada kepentingan umum. Misalnya, pegawai yang sering

berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti di bidang pelayanan administrasi, cenderung memiliki motivasi tinggi untuk menjaga reputasi baik instansi, sehingga mereka lebih patuh pada norma etika. Namun demikian, ada pula temuan yang menunjukkan bahwa integritas pegawai publik terkadang terancam oleh tekanan eksternal, seperti intervensi politik atau tuntutan dari pihak berkepentingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam kasus-kasus ini, meskipun etika sudah diajarkan, pegawai merasa kesulitan mempertahankan integritas karena adanya pengaruh dari luar yang kuat (Jumiati, 2012).

Akuntabilitas diakui sebagai salah satu prinsip utama dalam administrasi publik yang ditopang oleh penerapan etika. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas meningkat secara signifikan ketika etika diterapkan secara konsisten. Pegawai publik yang beretika lebih siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada atasan, rekan kerja, serta masyarakat. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa dengan adanya penerapan etika, prosedur pelaporan dan evaluasi kinerja menjadi lebih transparan dan obyektif (Hayani et al., 2024). Etika menuntut pegawai untuk tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga bertanggung jawab secara moral atas dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat. Misalnya, di sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan, penerapan etika mendorong pegawai untuk lebih fokus pada kualitas layanan dan hasil yang positif bagi masyarakat. Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa akuntabilitas sering kali terhambat oleh ketidaksesuaian antara peraturan formal dengan praktik di lapangan. Beberapa pegawai menyatakan bahwa meskipun mereka sudah berusaha menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pekerjaan sehari-hari, kurangnya dukungan dari atasan atau sistem pengawasan yang lemah membuat mereka merasa tidak cukup diberdayakan untuk bertanggung jawab secara penuh (Ismanto, 2012).

Hambatan dalam Penerapan Etika di Administrasi Publik Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang sering muncul dalam penerapan etika di administrasi publik. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Etika: Beberapa instansi tidak secara rutin memberikan pelatihan mengenai etika kepada pegawainya, sehingga kesadaran mengenai pentingnya etika dalam administrasi publik masih rendah di beberapa lingkungan kerja (Satibi & Ediyanto, 2020). Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung: Di beberapa organisasi, budaya kerja cenderung mendukung efisiensi dan hasil akhir, tanpa memperhatikan proses atau cara yang digunakan. Hal ini mendorong perilaku tidak etis karena pegawai lebih fokus pada pencapaian target daripada kepatuhan pada prinsip etika. Intervensi Eksternal Tekanan politik dan ekonomi dari pihak luar sering kali mengganggu penerapan etika. Pegawai publik

kadang-kadang terjebak dalam situasi di mana mereka dipaksa melanggar etika demi kepentingan pihak tertentu. Strategi Meningkatkan Penerapan Etika dalam Administrasi Publik Pelatihan Etika yang Berkelanjutan Pelatihan mengenai etika dan integritas perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi: Mekanisme pengawasan harus diperkuat, dan sanksi tegas perlu diterapkan terhadap pelanggaran etika, sehingga pegawai merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Peningkatan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan Proses pengambilan keputusan di instansi pemerintah harus lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga akuntabilitas pegawai lebih terjaga (Sukri J et al., 2017).

Dari hasil temuan tersebut, jelas bahwa etika memainkan peran sentral dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas di lingkungan administrasi publik. Penerapan etika secara konsisten dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta mendorong pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Namun, untuk mencapai penerapan etika yang optimal, diperlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari pegawai hingga pimpinan instansi, serta dukungan dari sistem regulasi dan pengawasan yang efektif (Widiaswari, 2022).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa etika memiliki peranan yang sangat penting dalam administrasi publik, terutama dalam membangun integritas dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip etika tidak hanya membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Etika administrasi publik berfungsi sebagai landasan moral bagi pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Penerapan etika yang baik akan membangun integritas pribadi dan kolektif, serta memastikan bahwa setiap tindakan pegawai dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Penerapan etika yang kuat dalam administrasi publik berkontribusi pada terciptanya transparansi dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat, di mana pegawai publik bekerja dengan orientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Meskipun etika sangat penting, masih terdapat hambatan dalam penerapannya, seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan etika, budaya organisasi yang tidak mendukung, dan intervensi eksternal yang dapat

memengaruhi keputusan dan perilaku pegawai publik. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih serius dan sistematis untuk memperkuat budaya etika di lingkungan administrasi publik. Untuk meningkatkan penerapan etika dalam administrasi publik, diperlukan langkah-langkah seperti pelatihan etika yang berkelanjutan, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi, serta peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan. Komitmen dari seluruh lapisan organisasi, baik dari pegawai maupun pimpinan, sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat. Dengan demikian, etika administrasi publik bukan hanya sekadar norma formal, tetapi merupakan komponen esensial dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, berintegritas, dan akuntabel. Dukungan yang kuat dari semua pihak dalam menegakkan etika ini sangat diperlukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

REFERENSI

- Asiva Noor Rachmayani. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 6.
- Bakhrur Rokhman , Denok Kurniasih, T. (2023). Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian e-ISSN : 2809-8862 Good Governance Di Indonesia. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, 14(7), 915–924. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/3950>
- Betresia, A., Situmeang, S. W., Verdina, P., Jannah, L. M., & Oktafia, E. (2021). Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia COVID-19. Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 138–154. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.13126>
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 9(3), 195–203. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>
- Dini Ayu Permata Sari, Ainul Yaqin, & Imam Sucahyo. (2024). Etika Administrasi Pada Peningkatan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Oleh Aparatur Di Kantor Desa Tegalorejo Kecamatan Dringu. Journal Administrasi Publuk Dan Ilmu Komunikasi, 11(1), 1–5. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v11i1.1146>
- Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., Helmi, R. F., Ilmu, P., Negara, A., Sosial, F. I., & Padang, U. N. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. 4.

- ismanto. (2012). 8. Ismanto. Revitalisasi Etika Administrasi Sebagai Manifestasi Paradigma New Public Service Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 3(1), 86–96.
- Jumiati, I. E. (2012). Dimensi Etika Dalam Pelayanan Publik, Arti Penting Dilema dan Implikasinya Bagi Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrasi Publik*, 3(1), 25–31.
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23), 1–23.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 済無No Title No Title No Title. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).
- Satibi, I., & Ediyanto, E. (2020). Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234–250. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.173>
- Sukri J, S. J., Idris, M., & Burhanuddin, B. (2017). Penerapan Etika Administrasi Negara Dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Di Kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 112. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.897>
- Sulfiyah, A., Burhanuddin, & Ma'ruf, A. (2023). Penerapan Etika Administrasi Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(1), 14–25. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/10451>
- Tjahjanti, P. H. (2020). Buku Ajar Mata Kuliah Metalurgi. In *Buku Ajar Mata Kuliah Metalurgi*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-90-2>
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wahyuli, Y. H. (2021). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia Public Administration Ethics in The Administration Of Governance in Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 182–189.
- Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 600. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.922>